



PENERAPAN STANDAR PELAPORAN KEUANGAN SERTA HUBUNGANNYA DENGAN ETIKA DAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Ayuk Yuliana

Fakultas Ekonomi, ayukyuliana010@gmail.com, Universitas Tidar

Abstract

This study aims to describe and analyze the application of financial reporting standards and their relationship with ethics and corporate governance. The method used is qualitative research data reduction method with the type of research that is descriptive statistics and the data used is secondary data. The results of this study indicate that the application of General SAK has been applied to companies, especially companies listed on the IDX, but the implementation of SAK ETAP, SAK EMKM, and SAK Syariah has not been maximized. There are still many entities that do not comply with applicable standards in compiling company performance reports. This is due to limitations and what stands out is due to limited quality of human resources in the entity. Meanwhile, in the implementation of financial recording and reporting, there is ethics from an accountant that needs to be considered because accountants will often be faced with problems in the form of ethical dilemmas. As in making reporting decisions, accountants will be faced with choices that create a dilemma so that accountants need to have a reference in the form of a code of ethics to be accountable for the decisions they have taken. The existence of ethical dilemmas that cannot be resolved will cause an imbalance in the company and make the management of a company not run optimally.

Keywords: Financial Accounting Standards, Financial Reporting, Ethics, Corporate Governance, Corporate Reporting.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan standar pelaporan keuangan serta hubungannya dengan etika dan tata kelola perusahaan. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif metode reduksi data dengan jenis penelitian yaitu statistik deskriptif dan data yang digunakan adalah data sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa penerapan SAK Umum sudah diterapkan pada perusahaan terutama perusahaan yang terdaftar di BEI, namun SAK ETAP, SAK EMKM, dan SAK Syariah penerapannya belum maksimal. Masih banyak entitas yang dalam menyusun pelaporan kinerja perusahaan tidak sesuai standar yang berlaku. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan dan yang menonjol adalah karena keterbatasan kualitas dari SDM dalam entitas tersebut. Sementara itu dalam pelaksanaan pencatatan dan pelaporan keuangan ini, ada etika dari seorang akuntan yang perlu diperhatikan karena akuntan akan sering dihadapkan pada permasalahan berupa dilema etika. Seperti halnya dalam pengambilan keputusan pelaporan, akuntan akan dihadapkan pada pilihan yang membuat dilema sehingga akuntan perlu adanya acuan yang berupa kode etik untuk mempertanggungjawabkan keputusan yang sudah diambilnya. Adanya dilema etik yang tidak bisa diatasi akan menyebabkan ketidakseimbangan dalam perusahaan dan menjadikan tata kelola suatu perusahaan tidak berjalan maksimal.

Kata Kunci: Standar Akuntansi Keuangan, Laporan Keuangan, Etika, Tata Kelola, Pelaporan Korporat

PENDAHULUAN

Salah satu alat atau instrumen untuk menilai akuntabilitas suatu perusahaan adalah dengan pelaporan korporat yang digunakan sebagai komunikasi dari pihak manajemen mengenai kondisi dan kinerja yang telah terlaksana kepada pemangku kepentingan. Lingkup dari pelaporan korporat ini cukup luas dan bergantung pada penekanan oleh pihak manajemen.

Pelaporan keuangan terdiri dari beberapa jenis, yaitu laporan keuangan, laporan tahunan, laporan tata kelola perusahaan, laporan *corporate social responsibility*, laporan keberlanjutan, dan laporan terintegrasi. Dari beberapa jenis laporan tersebut, laporan keuangan merupakan salah satu komponen penting dalam pelaporan korporat. Menurut *International Accounting Standard Board* (IASB), tujuan pelaporan keuangan, “untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang berguna bagi berbagai pengguna dalam membuat keputusan ekonomi.”

Mengingat pentingnya suatu laporan keuangan untuk menilai kesehatan perusahaan, maka penyusunan laporan keuangan juga tidak dilaksanakan secara sembrono namun harus dengan cermat dan tidak bias. Selain itu, suatu laporan keuangan hendaknya dapat diinterpretasikan oleh pihak berkepentingan dengan cara pandang yang sama. Oleh karena itu, diperlukan suatu standar akuntansi. Di Indonesia, standar akuntansi terdiri dari Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang diterbitkan oleh KSAP dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang diterbitkan oleh IAI. SAK di Indonesia meliputi SAK Umum, SAK ETAP, dan SAK EMKM. Selain itu, juga terdapat SAK transaksi syariah yang digunakan untuk entitas berbasis syariah. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa laporan keuangan juga digunakan oleh pemangku kepentingan, sehingga akuntansi di dalamnya harus dapat mengkomunikasikan kondisi perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, maka penggunaan atau penerapan standar akuntansi keuangan yang dapat diterima dan tentunya berlaku di tingkatan internasional, sehingga salah satu solusinya adalah perlu adanya konvergensi dengan IFRS.

Selanjutnya, mengenai etika. Etika berkaitan dengan moral dan tanggung jawab terhadap suatu hal. Dalam penerapan SAK dan SAP di atas diperlukan peran dari seorang akuntan. Sehingga etika seorang akuntan menjadi penting untuk diperhatikan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana penerapan standar pelaporan keuangan serta hubungannya dengan etika dan tata kelola suatu perusahaan.

TINJAUAN PUSTAKA

Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang diberikan kepada pengguna berkaitan dengan kondisi perusahaan dan bertujuan untuk mendeskripsikan keadaan perusahaan dan pengambilan keputusan (Mutiah, 2019). Definisi laporan keuangan juga disampaikan oleh (Norkamsiah, et al., 2016) bahwa laporan keuangan adalah proses akuntansi sebagai media komunikasi mengenai informasi antara data keuangan dan aktivitas perusahaan kepada pemakai untuk pengambilan keputusan dan berfungsi sebagai pertanggungjawaban dari pihak manajemen.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa, laporan keuangan adalah laporan yang di dalamnya informasi kondisi perusahaan maupun kinerja perusahaan yang dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan. Pengguna laporan keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam “Standar Akuntansi Keuangan” (2009:2), bahwa pengguna laporan keuangan meliputi investor sekarang dan investor potensial, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok dan kreditor usaha lainnya, pelanggan, pemerintah serta lembaga-lembaga lainnya dan masyarakat.

Standar Akuntansi

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam “Modul CA Pelaporan Korporat” (2021:3), menyatakan bahwa standar akuntansi terdiri dari SAP dan SAK, di mana SAK di Indonesia meliputi SAK Umum, SAK ETAP, dan SAK EMKM.

1. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010).
2. SAK Umum merupakan standar akuntansi untuk entitas yang diwajibkan menyusun laporan keuangan.
3. SAK ETAP dikeluarkan pertama kali bulan Mei 2009 oleh IAI dan penerapannya pada tanggal 1 Januari 2011. SAK ini hanya digunakan oleh entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik atau diperkenankan oleh regulator. Entitas yang terdaftar di pasar modal dan di industri keuangan, kecuali BPR yang diizinkan berdasar peraturan Bank Indonesia, tidak dapat menerapkan SAK ini. SAK ETAP mengacu pada PSAK 45 yang telah dicabut dan digantikan oleh ISAK 35.
4. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia, menyatakan bahwa SAK EMKM merupakan standar akuntansi keuangan yang berdiri sendiri dan digunakan oleh entitas yang memenuhi definisi ETAP yang signifikan sebagaimana diatur dalam SAK ETAP dan karakteristik menurut UU No. 20 tahun 2008. Setidaknya terdapat tiga laporan keuangan menurut SAK EMKM, yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan Catatan atas Laporan keuangan.
5. SAK Syariah merupakan standar akuntansi untuk entitas yang berbasis syariah. SAK Syariah tidak terbatas untuk entitas syariah, namun untuk semua entitas selama entitas melakukan transaksi dengan skema syariah. Secara khusus entitas syariah harus menggunakan SAK Umum, SAK ETAP, atau SAK EMKM sebagai dasar penyusunan keuangan dan SAK Syariah untuk transaksi yang berbasis syariah.

Etika dan Teori Etika

Etika dapat berarti sebagai kebiasaan. Etika memiliki definisi yang sangat beragam dan memiliki banyak ungkapan, tergantung pada persepsi. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam “Modul CA Pelaporan Korporat” (2021:26), menjelaskan bahwa etika menimbulkan isu yang tidak selalu jelas dan mudah dipahami, sehingga melahirkan teori etika tentang apakah tindakan atau perilaku pengambilan keputusan telah dilakukan secara etis atau tidak. Teori etika ini meliputi teori relativitas, teori utilitarian, teori egoisme, teori deontologi, teori perintah Tuhan, dan teori etika kebajikan. Kaitannya dengan seorang akuntan, teori etika tentunya juga menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan.

Tata Kelola Perusahaan

Tata kelola adalah salah satu bidang bisnis utama untuk meningkatkan kepercayaan investor dan memungkinkan untuk melindungi kepentingan investor (Ullah et al., 2017). Sementara itu, definisi tata kelola perusahaan adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan (Giovani, 2017). Sehingga tata kelola perusahaan dapat diartikan sebagai sistem untuk pengendalian perusahaan yang dapat meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan.

Penelitian Terdahulu

(Norkamsiah, et al., 2016). Dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa CV Aba Komputer belum menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan SAK ETAP dikarenakan pengetahuan dan SDM yang terbatas. Penelitian selanjutnya, (Oktavia, et al., 2019). Hasil penelitian pada UD. Karya Tunggal menunjukkan bahwa meskipun perusahaan telah menyusun laporan laba rugi, neraca, dan perubahan ekuitas, namun penyusunannya tidak sesuai dengan kaidah SAK ETAP.

Sementara itu, penelitian mengenai penerapan SAK EMKM, seperti yang dilakukan oleh (Mutiah, 2019) memberikan hasil penelitian bahwa pencatatan keuangan Silku Paritjah hanya sekedar pencatatan pembelian dan penjualan, sehingga belum sesuai dengan SAK EMKM. Selanjutnya, penelitian (Putra, 2018) Hasil penelitian menunjukkan bahwa 80,4% yang berarti mayoritas UMKM di Kota Tangerang Selatan belum menerapkan SAK EMKM dikarenakan beberapa kendala dalam pencatatannya.

(Ula, et al., 2020). KPRS An-Nahl sudah menerapkan SAK Syariah walaupun hanya laporan posisi keuangan, namun terdapat ketidaksesuaian karena tidak menyusun enam komponen laporan keuangan lainnya. (Ikhsan, et al., 2017). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Baitul Qiradh belum menerapkan SAK Syariah secara menyeluruh dikarenakan kendala SDM.

Dari hasil penelitian terdahulu yang sudah diuraikan di atas, terlihat bahwa SAK belum diterapkan secara maksimal di Indonesia. Banyak di antaranya dikarenakan terkendala dalam kemampuan dan ketersediaan sumber daya manusianya. Sehingga hal ini menjadi perhatian khusus tentang bagaimana cara mengatasi permasalahan penerapan tersebut agar SAK dapat diterapkan di entitas bersangkutan.

Companies that have competence in the fields of marketing, manufacturing and innovation can make its as a source to achieve competitive advantage (Daengs GS, et al. 2020:1419).

The research design is a plan to determine the resources and data that will be used to be processed in order to answer the research question. (Asep Iwa Soemantri, 2020:5).

Time management skills can facilitate the implementation of the work and plans outlined. (Rina Dewi, et al. 2020:14)

Standard of the company demands regarding the results or output produced are intended to develop the company. (Istanti, Enny, 2021:560).

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Penelitian dengan menggunakan penelitian kualitatif. Untuk jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian statistik deskriptif. Statistik deskriptif dilakukan dengan mengumpulkan, identifikasi, menilai, mengolah, menganalisis, dan mengidentifikasi data kuantitatif secara deskriptif yang berhubungan dengan topik yang dikaji. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu dari beberapa kumpulan artikel yang terdapat di laman *Google Scholar* dengan beberapa kata kunci yang sesuai dengan fokus pembahasan kali ini, yaitu “Penerapan Standar Akuntansi Keuangan” “Penerapan Etika dalam Perusahaan” dan “Faktor Tata Kelola Perusahaan yang Baik”.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah reduksi data berupa menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga simpulan – simpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi (Ahyar et al., 2020). Penelitian juga menggunakan *systematic review*, dengan mendownload artikel dari *google scholar* yang proses pengunduhannya dilakukan secara mandiri dengan menerapkan kriteria seperti bahasa dan tahun terbit artikel. Setelah itu artikel diperoleh maka selanjutnya adalah proses merangkum dan memilih hal pokok terkait topik dan menyajikan dalam bentuk pembahasan, lalu dapat ditarik kesimpulan setelah memperoleh bukti yang mendukung,

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia

Saat ini, di Indonesia terdapat beberapa standar akuntansi yang digunakan untuk mengatur berbagai entitas yang ada. Standar akuntansi ini terdiri dari Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), yang mana untuk SAK terdiri dari beberapa jenis yang meliputi SAK Umum, SAK ETAP, SAK EMKM, dan SAK Syariah.

Tiap SAK mengatur dan berisi pedoman sebagai standar dalam penyusunan laporan keuangan entitas yang bersangkutan. Perbedaan penggunaan SAK yang berdasarkan jenis entitas ini dikarenakan adanya perbedaan karakteristik dari tiap entitas, sehingga akan menjadi lebih mudah dipahami dan diterapkan jika disesuaikan dengan karakteristiknya.

Dalam hal penerapan SAK di Indonesia, untuk SAK Umum yang merupakan SAK berbasis *International Financial Reporting Standards* (IFRS) sudah banyak diterapkan oleh perusahaan-perusahaan besar terutama perusahaan *go-public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Laporan keuangan perusahaan-perusahaan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan dari SAK yang berlaku. Jenis laporan keuangannya pun sudah lengkap, bahkan sudah meliputi kelengkapan dari pelaporan korporat, yaitu adanya laporan keuangan, laporan tahunan, laporan tata kelola perusahaan, laporan *corporate social responsibility*, laporan keberlanjutan, dan laporan terintegrasi. Semua laporan tersebut dapat diperoleh baik dari *website* perusahaan bersangkutan maupun dari *website* BEI.

Hal ini, terutama dilatarbelakangi oleh jenis perusahaan yang merupakan perusahaan publik dan memiliki tanggung jawab untuk melakukan pelaporan sebagai kewajiban kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya yang berperan sebagai pengguna laporan keuangan. Perusahaan-perusahaan ini juga sudah memiliki kesadaran tentang peran laporan keuangan sebagai alat komunikasi keuangan yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Sehingga laporan yang disusun harus mudah dipahami, relevan, dan memiliki representatif yang tepat.

Selanjutnya, penerapan SAK ETAP. SAK ETAP diterapkan pada entitas tanpa akuntabilitas publik, di mana entitas ini memiliki dua kriteria untuk penggolongannya, yaitu tidak memiliki akuntabilitas yang signifikan dan tidak menerbitkan laporan keuangan bertujuan umum atau untuk pihak eksternal, seperti kreditur ataupun lembaga pemeringkat kredit. Entitas selain ETAP juga dapat menggunakan SAK ini jika sudah mendapatkan izin dari regulator, seperti pada BPR. Penerapan SAK ETAP yang lengkap akan berdampak pada pengelolaan bisnis yang menjadi lebih efektif, efisien, dan akurat. Jika dibandingkan dengan IFRS *for* SME, standar ini lebih sederhana, untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan. Selain itu, auditor yang bertugas juga mengacu pada SAK ETAP dan mencantumkannya dalam laporan audit. Namun, faktanya penerapan SAK ETAP di Indonesia belum maksimal. Hal ini dapat disimpulkan dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan. Penelitian-penelitian yang dimaksud seperti penelitian yang dilakukan oleh (Norkamsiah, et al., 2016), (Oktavia, et al., 2019), (Wuwungan, 2015), dan (Pratiwi, et al., 2014) yang semua hasil penelitiannya menyatakan bahwa SAK ETAP belum maksimal diterapkan pada perusahaan atau entitas yang diamati. Terdapat entitas yang sudah menerapkan standar ini, namun komponen laporan keuangannya tidaklah lengkap, seperti kurangnya Catatan atas Laporan Keuangan entitas.

Penerapan SAK EMKM. Sesuai dengan namanya, SAK ini diterapkan oleh entitas Mikro, Kecil, dan Menengah yang diterbitkan oleh IAI pada 24 Oktober 2016 dan berlaku efektif 1 Januari 2018. Sebelumnya, untuk entitas ini tidak memiliki standar sendiri dan sebagian besar mengikuti SAK ETAP. Namun, kenyataannya ada beberapa hal yang tidak bisa dipersamakan antara entitas ini dengan ETAP, dengan kata lain adanya perbedaan karakteristik, sehingga menimbulkan kesulitan dalam penerapannya. Setidaknya, untuk laporan keuangannya terdiri dari tiga jenis yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan CaLK.

Penerapan SAK ini juga belum maksimal dilakukan oleh entitas Mikro Kecil dan Menengah. Sebagian dari mereka belum membuat laporan sesuai standar yang berlaku dan hanya mencatat pemasukan dan pengeluaran saja dikarenakan keterbatasan. Terakhir adalah penerapan SAK Syariah. SAK Syariah ini digunakan oleh entitas yang transaksinya berbasis syariah dan tidak terbatas pada entitas syariah. Lebih khususnya, entitas syariah harus menggunakan SAK lainnya sebagai dasar penyusunan laporan keuangan dan SAK Syariah untuk transaksi berbasis syariah. Sebagai ilustrasi SAK yang digunakan oleh lembaga syariah seperti SAK Umum oleh Bank Umum Syariah, SAK ETAP oleh BPR Syariah, dan SAK EMKM oleh lembaga keuangan mikro syariah. Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, SAK Syariah pun belum dapat diterapkan dengan optimal, terutama untuk entitas syariah atau entitas lainnya yang ukurannya tidaklah besar.

Permasalahan Penerapan Standar Akuntansi di Indonesia

Penerapan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia sampai saat ini belum maksimal. Hal ini terutama untuk entitas-entitas yang ukuran perusahaannya tidak besar. Seperti yang sudah diuraikan di atas, penerapan yang belum maksimal adalah pada penerapan SAK ETAP, SAK EMKM, dan SAK Syariah. Belum maksimalnya penerapan SAK ini dikarenakan beberapa hal berikut:

1. Latar belakang pendidikan pemilik atau pengelola
2. Usia pengelola, terutama bagi pemilik atau pengelola UMKM yang biasanya tidak ada pembatasan maksimal usia.
3. Jumlah aktivitas transaksi suatu entitas.
4. Terbatasnya pemikiran tentang pengelolaan laporan keuangan. Dengan kata lain, kurangnya kesadaran akan pentingnya pelaporan keuangan terutama yang sesuai dengan SAK yang berlaku.
5. Terbatasnya jumlah dan kemampuan dari SDM

Meskipun demikian bukan berarti penerapan SAK Umum sudah sempurna, karena tentu saja dalam penerapannya akan menemui kendala, seperti dalam hal adanya laporan keuangan konsolidasian atau ketika melakukan konvergensi IFRS.

Solusi dalam Mengatasi Permasalahan Penerapan Standar Akuntansi di Indonesia

Adanya permasalahan yang timbul akibat dari penerapan SAK di Indonesia mengharuskan untuk dapat memikirkan solusi agar dapat mengatasi hal tersebut dan dapat menciptakan entitas yang sehat dari sisi keuangannya. Berikut adalah beberapa solusi dalam mengatasi permasalahan tersebut:

1. Entitas mempekerjakan seseorang yang sesuai dengan bidangnya. Dalam hal ini adalah seorang akuntan atau minimal merupakan seorang lulusan Sekolah Menengah Kejuruan dengan jurusan Akuntansi.
2. Ada batasan usia ketika menjadi seorang pemilik ataupun pengelola suatu entitas. Hal ini dilakukan untuk menghindari bias dalam pengambilan keputusan ataupun meningkatkan ketepatan dalam penyusunan laporan keuangan.
3. Sekalipun aktivitas dalam suatu entitas tidaklah bervariasi, namun pencatatan yang sesuai dengan standar akuntansi tetap diperlukan agar tidak terjadi kesalahan pengklasifikasian dikemudian hari ketika perusahaan sudah bertumbuh menjadi lebih besar. Selain itu, aktivitas keluar masuk aliran kas baik itu ETAP, EMKM, maupun Syariah baik dengan ukuran perusahaan yang besar maupun kecil, pastinya aliran kas terus berjalan selama satu periode, sehingga pencatatan sesuai standar jelas perlu dilakukan.
4. Mengikuti pelatihan-pelatihan mengenai pencatatan pelaporan keuangan agar melatih keterampilan pencatatan laporan.
5. Memperbanyak literasi mengenai pelaporan keuangan dan juga selalu *up to date* tentang perubahan-perubahan peraturan atau standar yang berlaku.
6. Pemerintah melakukan sosialisasi, pelatihan, dan pengawasan terhadap pelaporan keuangan yang sesuai SAK kepada entitas-entitas terutama bagi UMKM, karena entitas ini memiliki peran besar dalam peningkatan perekonomian terutama dalam suatu daerah.

Hubungan Penerapan Standar Akuntansi dengan Etika dan Tata Kelola Perusahaan

Etika memiliki beragam pengertian atau definisi. Kaitannya dengan akuntan dalam penyusunan laporan keuangan dalam suatu perusahaan tentang apakah suatu keputusan telah dilakukan secara etis atau tidak. Perilaku ataupun pengambilan keputusan dapat dinilai etis atau tidak, tergantung pada sudut pandang dan perspektifnya. Ketika dihadapkan dalam suatu dilema etika dalam menghadapi permasalahan terutama pengambilan keputusan, teori etika dapat membantu. Dilema etika ini dapat terjadi karena perbedaan sesuatu yang diyakini dengan keputusan yang diambil, serta keputusan yang diambil tersebut memiliki dampak yang bertolak belakang dari pihak bersangkutan.

Laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan digunakan sebagai bentuk tanggung jawab yang disajikan dalam bentuk laporan kepada pihak prinsipal. Sehingga ada hubungan antara pihak prinsipal (pemberi wewenang) dengan pihak agen (diberi wewenang). Agen dalam perusahaan berarti adalah manajemen, berwenang mengolah sumber daya perusahaan dan kemudian memberi timbal balik kepada pihak prinsipal. Dengan ini, pihak agen berarti memiliki informasi lebih banyak, atau biasa disebut dengan asimetris informasi. Hal ini akan memotivasi agen untuk menguntungkan diri sendiri. Dikarenakan perbedaan kepentingan atas laporan keuangan ini, akan menimbulkan *agency problem*. Situasi seperti ini pasti akan dialami oleh seorang akuntan dalam suatu perusahaan. Dilema antara pengungkapan kinerja keuangan yang sesungguhnya atau potensi bonus yang hilang dan turunnya harga saham akibat pengungkapan kinerja tersebut. Timbulnya kegagalan mengatasi permasalahan etika yang dihadapi seorang akuntan dapat menyebabkan kecurangan-kecurangan yang melibatkan para akuntan di dalamnya.

Adanya kecurangan ini dan permasalahan etika lainnya tentunya sebagai dampak dari pelaksanaan tata kelola perusahaan yang tidak maksimal. Tata kelola pada dasarnya merupakan sistem untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan. Untuk melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik, setidaknya terdapat enam prinsip dasar yang harus dipatuhi, yaitu:

1. Memastikan dasar untuk kerangka tata kelola perusahaan yang efektif.
2. Memberikan perlindungan dan fasilitas terhadap pemegang saham, termasuk minoritas dan asing.
3. Memberi insentif yang efektif di seluruh rantai investasi dan mendorong pasar modal.
4. Mengakui hak para pemangku kepentingan berdasarkan hukum dan kesepakatan.
5. Pengungkapan dan transparansi.
6. Tanggung jawab dewan.

Mitigasi Permasalahan Etika Akuntan

Saat menghadapi dilema etika, akuntan tetap harus melakukan pertanggungjawaban atas keputusan yang diambil. Salah satu unsur penting dilema etika dalam pengambilan keputusan adalah dengan adanya acuan, yaitu kode etik profesi.

Kode etik dapat digunakan sebagai acuan dalam berperilaku baik atau buruk yang melekat pada ruang lingkup yang diaturnya. Dalam pembahasan ini adalah kode etik akuntan Indonesia, yang mengacu pada *Code of Ethics for Accountants* (IESBA).

Sementara itu, di Indonesia kode etik akuntan telah disahkan pada 18 November 2019 dan berlaku efektif pada 1 Juli 2020. Bagian dalam Kode Etik Akuntan Profesional, yaitu:

1. Bagian 1 mengenai kepatuhan terhadap kode etik.
2. Bagian 2 mengenai akuntan yang bekerja di bisnis.
3. Bagian 3 mengenai akuntan yang berpraktik melayani publik.

Prinsip dasar etika yang harus dipatuhi akuntan meliputi integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, serta profesional. Berikut merupakan mitigasi permasalahan etika dalam pelaporan korporat:

1. Menolak untuk atau tetap dikaitkan dengan informasi yang dianggap menyesatkan
2. Mengambil langkah agar tidak dikaitkan dengan informasi yang dianggap menyesatkan
3. Mempertimbangkan untuk memperoleh nasihat hukum dan mengundurkan diri mengenai persyaratan melaporkan informasi menyesatkan ke luar organisasi

KESIMPULAN

Pelaporan korporat digunakan sebagai alat komunikasi keuangan pihak manajemen kepada pemangku kepentingan untuk menilai akuntabilitas dari suatu perusahaan. Salah satu komponen penting pelaporan korporat yaitu laporan keuangan. Melihat pentingnya peran suatu laporan keuangan, dibutuhkan suatu standar akuntansi yang menjadi pedoman pencatatannya, yang mana di Indonesia sendiri standar akuntansi terdiri dari SAP dan SAK (SAK Umum, SAK ETAP, SAK EMKM, dan SAK Syariah). Setiap standar diterapkan pada entitas sesuai dengan kriteria dan kebutuhan suatu perusahaan. Penerapan setiap standar akuntansi di Indonesia masih belum maksimal dan belum merata pada setiap entitas. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa (1) penerapan SAK Umum ataupun SAK konvergensi IFRS sudah diterapkan perusahaan-perusahaan terutama perusahaan publik yang terdaftar di BEI.

Pelaporan keuangan yang lengkap ini dapat dilihat baik melalui *website* resmi perusahaan maupun *website* BEI. (2) SAK ETAP, masih belum diterapkan secara maksimal dan merata pada entitas tanpa akuntabilitas publik. (3) SAK EMKM, berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang sudah dilaksanakan, penerapan SAK ini masih belum maksimal dan tidak merata (4) SAK Syariah, untuk SAK ini juga dalam penerapannya masih belum merata terutama bagi entitas yang masih kecil. Belum terlaksananya penerapan yang maksimal dan merata ini sebagian besar diltarbelakangi karena keterbatasan pengetahuan dan kualitas SDM yang ada pada suatu entitas serta belum ada kesadaran untuk menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Sehingga solusi dalam mengatasi permasalahan ini tentunya dengan menyelesaikan permasalahan kualitas SDM yang ada, dimulai dari pembenahan SDM yang harus dipekerjakan dan tidak dengan menerapkan kriteria-kriteria sebagai penunjang. Selain itu juga mengikuti pelatihan-pelatihan dapat meningkatkan keterampilan individu dalam menjalankan tugas pencatatan laporan keuangannya.

Kaitannya dengan penyusunan suatu laporan keuangan perusahaan, seorang akuntan akan dihadapkan dengan suatu permasalahan yang akan menjadi dilema etika. Permasalahan ini seperti dilema antara melakukan pengungkapan yang sebenarnya dan potensi kehilangan bonus serta turunnya harga saham akibat pengungkapan tersebut. Dilema ini timbul karena adanya *agency problem* dan mengakibatkan adanya kecurangan.

Hal ini juga sebagai dampak dari pelaksanaan tata kelola perusahaan yang tidak maksimal, yang mana salah satu tujuan adanya tata kelola adalah sebagai perencana dan pengendali dalam suatu perusahaan. Jika kecurangan terjadi, artinya pengendalian yang dilakukan perusahaan belum maksimal dan perlu adanya mitigasi atas kecurangan ini. Unsur penting dalam mengatasi dilema etika seorang akuntan ini adalah adanya sebuah acuan yang berbentuk kode etik akuntan. Kode etik ini mengatur tentang apa saja perilaku atau aktivitas yang dapat dikatakan etis maupun tidak etis dalam suatu profesi akuntansi. Sebagai seorang akuntan, setidaknya harus mematuhi prinsip dasar yang meliputi integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kersahasiaan, dan profesional.

DAFTAR PUSTAKA

- N. A. I. Kesuma and A. Setiawaty, "Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada Penyusunan Laporan Keuangan," *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, vol. 13, no. 2, pp. 151-163, 2016.
- P. D. Oktavia and S. Sunrowiyati, "PENERAPAN SAK ETAP PADA LAPORAN KEUANGAN UD. KARYA TUNGGAL," *Jurnal PETA*, vol. 4, no. 1, pp. 16-32, 2019.
- R. A. Mutiah, "Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan pada UMKM Berbasis SAK EMKM," *International Journal of Social Science and Business*, vol. 3, no. 3, pp. 223-229, 2019.
- Y. M. Putra, "PEMETAAN PENERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN EMKM PADA UMKM DI KOTA TANGERANG SELATAN," *Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan*, vol. 11, no. 2, pp. 201-217, 2018.
- J. Y. S. Wuwungan, "ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK ATAS PERSEDIAAN PADA APOTIK UNO MEDIKA," *Jurnal EMBA*, vol. 3, no. 4, pp. 498-507, 2015.
- T. Amani, "Penerapan SAK-EMKM Sebagai Dasar Penyusunan Laporan Keuangan UMKM (Studi Kasus di UD Dua Putri Solehah Purbolinggo)," *ASSET : Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan dan Pajak*, vol. 2, no. 2, pp. 12-20, 2018.
- S. Margareta and G. Soepriyanto, "PENERAPAN IFRS DAN PENGARUHNYA TERHADAP KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN: STUDI EMPIRIS PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE TAHUN 2008-2010," *BINUS BUSINESS REVIEW*, vol. 3, no. 2, pp. 993-1009, 2012.

S. Ayem and R. Prihatin, "Pengaruh Penerapan

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Dan Menengah Dan Tax Planing (Studi Kasus UMKM di kota Yogyakarta)," *Jurnal Akuntansi Profesi*, vol. 11, no. 1, pp. 115-125, 2020.

K. Onasis and R. , "PENGARUH TATA

KELOLA PERUSAHAAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN SEKTOR KEUANGAN YANG TERDAFTAR DI BEI," *Bina Ekonomi*, vol. 20, no. 1, pp. 1-22, 2016.

M. T. Apriliani and T. Dewayanto,

"PENGARUH TATA KELOLA PERUSAHAAN, UKURAN PERUSAHAAN DAN UMUR PERUSAHAAN TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN," *Diponegoro Journal of Accounting*, vol. 7, no. 1, pp. 1-10, 2018.

IPratama, "Tata Kelola Perusahaan dan Atribut

Perusahaan pada Ketepatan Pelaporan Keuangan: Bukti dari Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia," *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, vol. 4, no. 3, pp. 1959-1967, 2022.

M. Giovani, "PENGARUH STRUKTUR

KEPEMILIKAN, TATA KELOLA PERUSAHAAN, DAN KARAKTERISTIK PERUSAHAAN TERHADAP MANAJEMEN LABA," *Jurnal Akuntansi Bisnis*, vol. 15, no. 2, pp. 290-306, 2017.

E. Triuwono, S. Ng and F. E. Daromes, "TATA

KELOLA PERUSAHAAN SEBAGAI MEKANISME PENGELOLAAN RISIKO UNTUK MENINGKATKAN NILAI PERUSAHAAN," *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, vol. 20, no. 2, pp. 205-229, 2020.

U. Wahidah and S. Ayem, "PENGARUH

PENGADOPIAN INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS (IFRS) TERHADAP KUALITAS INFORMASI AKUNTANSI PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA," *Syariah Paper Accounting*, pp. 327-337, 2015.

A.Ikhsan and M. Haridhi, "PENERAPAN

STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN SYARIAH PADA KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH (STUDI PADA BAITUL QIRADH DI KOTA BANDA ACEH)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, vol. 2, no. 3, pp. 100-110, 2017.

A.A.Pratiwi, J. J. Sondakh and L. Kalangi,

"ANALISIS PENERAPAN SAK ETAP PADA PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PT. NICHINDO MANADO SUISAN," *Jurnal EMBA*, vol. 2, no. 3, pp. 254-265, 2014.

B. Widiastawati and D. Hambali,

"PENERAPAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (sAK EMKM) PADA UMKM UD SARI BUNGA," *Journal of Accounting, Finance and Auditing*, vol. 2, no. 2, pp. 38-48, 2020.

N. Ula and Nawirah, "IMPLEMENTASI SAK

SYARIAH DALAM LAPORAN KEUANGAN KOPERASI PENGKREDITAN RAKYAT SYARIAH (KPRS)," *EL MUHASABA : Jurnal Akuntansi*, vol. 11, no. 2, pp. 123-132, 2020.

B. Nathania and Y. Karnawati, "Pengaruh Tata

Kelola Perusahaan, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Struktur Modal Terhadap Nilai Perusahaan," *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, vol. 3, no. 2, pp. 193-207, 2022.

N. F. Dosinta and H. Brata, "POLITIK

PENAMAAN DI DALAM PELAPORAN KORPORAT PASCAIMPLEMENTASI INTEGRATED REPORTING," *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, vol. 11, no. 1, pp. 138-158, 2020.

I.A.I. (IAI), Modul CA Pelaporan Korporat,

Jakarta Pusat: Ikatan Akuntan Indonesia, 2021.

Daengs, G. S. A., Istanti, E., Negoro, R. M. B.

K., & Sanusi, R. (2020). The Aftermath of Management Action on Competitive Advantage Through Proccess Attributes at Food and Beverage Industries Export Import in Perak Harbor of Surabaya. *International Journal Of Criminology and Sociologi*, 9, 1418–1425.

Enny Istanti1), Bramastyo Kusumo2), I. N.

(2020). IMPLEMENTASI HARGA, KUALITAS PELAYANAN DAN PEMBELIAN BERULANG PADA PENJUALAN PRODUK GAMIS AFIFATHIN. *Ekonomika* 45, 8(1), 1–10.

Iwa Soemantri, Asep et al. 2020.

Entrepreneurship Orientation Strategy, Market Orientation And Its

Effect On Business Performance In MSMEs. *Jurnal EKSPEKTRA Unitomo* Vol. IV No. 1, Hal. 1-10.

Rina Dewi, et al. 2020. Internal Factor Effects In

Forming The Success Of Small Businesses. *Jurnal SINERGI UNITOMO*, Vol. 10 No. 1, Hal. 13-21.